

ANALISIS TINGKAT GOLONGAN PUTIH PADA PEMILIHAN WALIKOTA (PILWALI) 2018 DI KOTA MAKASSAR

Oleh:
Bachtiar
Universitas Pejuang Republik Indonesia

Abstrak

Pendidikan bukanlah satu-satunya hal yang menjadi tulang punggung pembangunan bangsa, pendidikan tidak bisa berdiri sendiri sebagai kekuatan penggerak bangsa, tapi pendidikan adalah salah satu pondasi pokok pembangunan bangsa, masyarakat yang cerdas, mandiri dan berdikari baru dapat terbentuk ketika rakyat mendapat pendidikan yang cukup dan memberikan wacana bersama. Dalam hal ini pemerintah daerah sebagai pengambil kebijakan tertinggi di daerahnya masing-masing memegang peranan penuh dalam pengambilan kebijakan. Apakah kebijakan yang diambil itu mampu mengakomodir semua kebutuhan dari rakyat dan bisa menjadi salah satu faktor kemajuan daerahnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran tentang sejauh mana pengaruh dimensi lingkungan terhadap proses pengambilan kebijakan dalam sektor pendidikan di Kota Makassar dan untuk menjelaskan proses pengambilan kebijakan pada sektor pendidikan di Kota Makassar.

Hasil penelitian ini menemukan bahwa kebijakan publik dalam sektor pendidikan di Kota Makassar dipengaruhi oleh lingkungan kebijakan itu sendiri dan oleh nilai-nilai politik yang lebih mencerminkan kehendak atau persepsi penguasa, sehingga kebijakan publik yang dihasilkan memperlihatkan suasana dominan pengaruh dari kepentingan pemerintah daerah Kota Makassar. Kenyataan tersebut termasuk juga pengaruh dalam proses analisisnya yang cenderung lebih menekankan nilai-nilai dan pandangan sepihak dari Pemerintah Kota Makassar.

Lingkungan kebijakan publik dari dimensi sosial mengenai kebijakan dalam sektor pendidikan selama ini cenderung pasif, di mana tidak terdapat persepsi yang sama di kalangan masyarakat mengenai siapa sebenarnya menjadi tanggung jawab pemerintah kota. Namun bagi masyarakat yang penting adalah bagaimana kebutuhan akan pendidikan dapat tersedia.

Kata Kunci: Golongan putih, pemilihan Walikota

PENDAHULUAN

Golongan putih (Golput) dapat diartikan sebagai pemilih yang tidak mempergunakan hak pilihnya secara sadar tanpa ada paksaan dari pihak lain. Beberapa ahli sering mengidentikan golput dengan apatis. Apatisisme adalah ketidakpedulian individu dimana mereka tidak memiliki minat atau tidak adanya perhatian terhadap aspek-aspek tertentu seperti kehidupan sosial maupun aspek fisik dan emosional. Gejala dari sifat apatis dapat dilihat dari kurangnya kesadaran, kepedulian dan bahkan sifat tidak tanggung jawab sosial yang dapat berpengaruh kepada pemungutan suara, hal itu terlihat khususnya pada pemilih pemula yang berumur 17-24 tahun.

Menurut Kacung Marijan bahwa di beberapa daerah terdapat setidaknya lima alasan masyarakat menjadi golput yakni: *Pertama*, bagi para pemilih datang ke TPS-TPS tidak lagi penting karena tidak ada isu yang signifikan; *Kedua*, analisis ini dikaitkan dengan globalisasi yang semakin mereduksi kekuatan negara sehingga golput telah menjadi fenomena global; *Ketiga*, penurunan tingkat

partisipasi pemilih itu dikaitkan dengan turunnya tingkat kepuasan terhadap performance pemerintah; *Keempat*, golput juga dapat di akibatkan oleh tingkat kepercayaan yang terlalu tinggi kepada pemerintah yang sedang menjabat. Kelima, meningkatnya golput diakibatkan kecenderungan budaya politik yang ada dalam masyarakat.

Golongan putih (golput, selanjutnya akan disebut demikian) telah menjadi fenomena politik yang menarik di Makassar. Golput diartikan sebagai pemilih yang tidak mempergunakan hak pilihnya secara sadar tanpa ada paksaan dari pihak lain. Terdapat sejumlah analisis untuk menjelaskan pertanyaan mengapa terdapat fenomena golput di banyak daerah.

Jika dihubungkan dengan fenomena pilwali di kota makassar maka menurut penulis bahwa lebih sesuai jika menggunakan analisis ketiga dan kelima sebagai kerangka dasar analisis untuk memahami fenomena tentang relatif tingginya jumlah golput.

Tingkat partisipasi pemilih di Kota Makassar pada pemilihan walikota tahun 2018 menurun bila dibandingkan pada tahun 2013 yakni: berdasarkan data yang ada, pada pemilihan kepala daerah Makassar tahun 2013, tingkat partisipasi pemilih berada di angka 59,94 persen, dan pada tahun 2018, partisipasi pemilih turun sekitar dua poin menjadi 57,02 persen. Dengan demikian, hanya sekitar 584.406 yang menggunakan hak pilihnya dari jumlah daftar pemilih tetap (DPT) sebanyak 1,01 juta. Padahal, KPU telah melakukan berbagai macam sosialisasi jauh-jauh hari sebelum masa pencoblosan. Sekitar 42,98% warga Makassar yang mempunyai hak pilih tidak menggunakan hak pilihnya alias golongan putih (golput). Melihat angka golput yang begitu tinggi dan angka pemilih yang tidak terlalu meningkat menunjukkan adanya kekurangan dalam sistem demokrasi itu sendiri.

Beberapa hal sehingga seseorang menjadi golput yaitu ada yang golput secara administratif dimana hal ini terjadi karena calon pemilih tidak mendapatkan kartu panggilan memilih dan sebagainya, ada pula pemilih yang sudah terlalu berfikir negatif terhadap aktor politik sehingga mereka tidak mau lagi memilih dengan anggapan bahwa semua calonnya sama saja tidak akan membawa perubahan pada masyarakat.

Terdapat berbagai usaha untuk menarik minat masyarakat untuk datang memilih. Seperti yang dilakukan oleh KPU dan partai politik tertentu. Hal ini dianggap kurang maksimal dikarenakan tetap tingginya angka golput, hal ini membuktikan bahwa masyarakat tidak terlalu peduli untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik utamanya pilwali di kota makassar.

KONSEP GOLONGAN PUTIH (GOLPUT)

Pada zaman Orde Baru tahun 1971, istilah golput muncul pertama kali menjelang pemilu yang diprakarsai oleh beberapa tokoh dan aktivis pada waktu itu antara lain Arief Budiman, dan Julius Usman. Bukan hanya memproklamasikan diri sebagai golongan putih yang tidak memilih, mereka juga mengajukan tanda gambar segilima hitam dengan dasar putih. Namun pemilu 1971 menurut versi pemerintahan, diikuti oleh 95 persen pemilih. Satu hal yang mencuat dari kemunculan fenomena

golput adalah merebaknya protes atau ketidakpuasan kelompok masyarakat tertentu terhadap tidak tegaknya prinsip-prinsip demokrasi atau penentangan langsung terhadap eksistensi rezim Orde Baru pimpinan Soeharto.

Pada waktu itu Golput adalah hanya mereka yang dengan sengaja dan dengan suatu maksud dan tujuan yang jelas menolak memberikan suara dalam pemilu. Dengan demikian, orang-orang yang berhalangan hadir di Tempat Pemilihan Suara (TPS) hanya karena alasan teknis, seperti jauhnya TPS atau terluput dari pendaftaran, otomatis dikeluarkan dari kategori golput. Begitu pula persyaratan yang diperlukan untuk menjadi golput bukan lagi sekedar memiliki rasa enggan atau malas ke TPS tanpa maksud yang jelas. Pengecualian kedua golongan ini dari istilah golput tidak hanya memurnikan wawasan mengenai kelompok itu, melainkan juga sekaligus memperkecil kemungkinan terjadinya pengaburan makna, baik di sengaja maupun tidak.

Senada dengan Indra J. Piliang menyatakan bahwa golongan putih (golput) dianggap sebagai bentuk perlawanan atas partai-partai politik dan calon presiden-wakil presiden yang tidak sesuai dengan aspirasi orang-orang yang kemudian golput. Dia membagi golput menjadi 3 bagian yaitu:

Pertama, golput ideologis, yakni segala jenis penolakan atas apa pun produk sistem ketatanegaraan hari ini. Golput jenis ini mirip dengan golput era 1970-an, yakni semacam gerakan anti-state, ketika state dianggap hanyalah bagian korporatis dari sejumlah elite terbatas yang tidak punya legitimasi kedaulatan rakyat. Kedua, golput pragmatis yakni golput yang berdasarkan kalkulasi rasional betapa ada atau tidak ada pemilu, ikut atau tidak ikut memilih, tidak akan berdampak atas diri si pemilih. Ketiga, golput politis yakni golput yang dilakukan akibat pilihan-pilihan politik. Kelompok ini masih percaya kepada negara, juga percaya kepada pemilu, tetapi memilih golput akibat preferensi politiknya berubah atau akibat sistemnya secara sebagian merugikan mereka.

Eep Saefulloh Fatah juga telah merangkum sebab-sebab orang untuk golput, diantaranya adalah:

1. Golput teknis, hal ini dikarenakan sifat teknis berhalangan hadir ke tempat pemungutan suara, atau salah mencoblos sehingga suaranya dinyatakan tak sah, atau tidak terdaftar sebagai pemilih karena kesalahan teknis pendataan penyelenggara pemilu.
2. Golput politis, hal ini untuk masyarakat yang tak punya pilihan dari kandidat yang tersedia atau pesimistis bahwa pemilu/pilkada akan membawa perubahan dan perbaikan.
3. Golput ideologis, yang tak percaya pada mekanisme demokrasi (liberal) dan tak mau terlibat didalamnya entah karena alasan nilai-nilai agama atau alasan politik-ideologi lain.

Golput dalam terminologi ilmu politik seringkali disebut dengan non-voter. Terminologi ini menunjukkan besaran angka yang dihasilkan dari event pemilu diluar voter turn out. Louis Desipio, Natalie Masuoka dan Christopher Stoutmengkategorikan Non-Voter tersebut menjadi tiga kategori yakni: (a) Registered Not Voted yaitu kalangan warga negara yang memiliki hak pilih dan telah terdaftar namun tidak menggunakan hak pilih, (b) Citizen not Registered yaitu kalangan warga negara

yang memiliki hak pilih namun tidak terdaftar sehingga tidak memiliki hak pilih dan (c) Non Citizen yaitu mereka yang dianggap bukan warga negara (penduduk suatu daerah) sehingga tidak memiliki hak pilih.

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PRILAKU TIDAK MEMILIH (GOLPUT)

Secara umum terdapat dua pendekatan untuk menjelaskan kehadiran pemilih atau ketidakhadiran pemilih dalam suatu pemilu.

Pendekatan pertama menekankan pada karakteristik social dan psikologi. Sementara itu, pendekatan kedua menekankan pada harapan pemilih tentang keuntungan dan kerugian atas keputusan mereka untuk hadir atau tidak hadir dalam memilih. Hanya saja, kedua pendekatan tersebut didalam dirinya sama-sama memiliki kesulitan dan mengandung kontroversi masing-masing .

1. Faktor Sosial Ekonomi

Menempatkan variabel status sosial-ekonomi sebagai variabel penjelasan perilaku non-voting selalu mengandung makna ganda. Pada satu sisi, variabel status sosial ekonomi memang dapat diletakkan sebagai variabel independen untuk menjelaskan perilaku non-voting tersebut. Namun, pada sisi lain variabel tersebut juga dapat digunakan sebagai indikator untuk mengukur karakteristik pemilih non-voting itu sendiri. Setidaknya ada empat indikator yang bisa digunakan mengukur variabel status sosial ekonomi, yaitu tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, pekerjaan dan pengaruh keluarga. Lazimnya, variabel status sosial-ekonomi digunakan untuk menjelaskan perilaku memilih. Namun dengan menggunakan proporsi yang berlawanan, pada saat yang sama variabel tersebut sebenarnya juga dapat digunakan untuk menjelaskan perilaku non-voting. Artinya, jika tinggi tingkat pendidikan berhubungan dengan kehadiran memilih, itu berarti rendahnya tingkat pendidikan berhubungan dengan ketidakhadiran pemilih.

2. Faktor Psikologis

Orang yang mempunyai kepribadian yang tidak memilih atau non-voting dari faktor psikologis pada dasarnya dikelompokkan dalam dua kategori. Pertama, berkaitan dengan ciri-ciri kepribadian seseorang. Kedua, berkaitan dengan orientasi kepribadian. Penjelasan pertama melihat bahwa perilaku non-voting disebabkan oleh kepribadian yang tidak toleran, otoriter, tak acuh, perasaan tidak aman, perasaan khawatir, kurang mempunyai tanggung jawab secara pribadi, dan semacamnya toleran atau tak acuh cenderung untuk tidak memilih. Sebab, apa yang diperjuangkan kandidat atau partai politik tidak selalu sejalan dengan kepentingan perorangan secara langsung, betapapun mungkin hal itu menyangkut kepentingan umum yang lebih luas.

Dalam konteks semacam ini, para pemilih yang mempunyai kepribadian tidak toleran atau tak acuh cenderung menarik diri dari percaturan politik langsung, karena tidak berhubungan dengan kepentingannya. Ciri-ciri kepribadian ini umumnya diperoleh sejak lahir bahkan lebih

bersifat keturunan dan muncul secara konsisten dalam setiap perilaku. Faktor lain yang dapat digunakan untuk menandai ciri kepribadian ini adalah keefektifan personal (personal effectiveness), yaitu kemampuan atau ketidakmampuan seseorang untuk memimpin lingkungan di sekitarnya. Misalnya, seberapa jauh seseorang merasa mampu memimpin teman-teman sepermainan, organisasi-organisasi sosial, profesi atau okupasi di mana mereka bekerja, dan sebagainya.

Sementara itu, penjelasan kedua lebih menitikberatkan faktor orientasi kepribadian. Penjelasan kedua ini melihat bahwa perilaku nonvoting disebabkan oleh orientasi kepribadian pemilih, yang secara konseptual menunjukkan karakteristik apatis.

3. Faktor Rasional

Faktor pilihan rasional melihat kegiatan memilih sebagai produk kalkulasi untung dan rugi. Yang dipertimbangkan tidak hanya “ongkos” memilih dan kemungkinan suaranya dapat mempengaruhi hasil yang diharapkan, tetapi juga perbedaan dari alternatif berupa pilihan yang ada. Pertimbangan ini digunakan pemilih dan kandidat yang hendak mencalonkan diri untuk terpilih sebagai wakil rakyat atau pejabat pemerintah. Bagi pemilih, pertimbangan untung dan rugi digunakan untuk membuat keputusan tentang partai dan kandidat yang dipilih, terutama untuk membuat keputusan apakah ikut memilih atau tidak ikut memilih.

Pada kenyataannya, ada sebagian pemilih yang mengubah pilihan politiknya dari satu pemilu ke pemilu lainnya. Ini disebabkan oleh ketergantungan pada peristiwa-peristiwa politik tertentu yang bisa saja mengubah preferensi pilihan politik seseorang. Hal ini berarti ada variabel-variabel lain yang ikut menentukan dalam mempengaruhi perilaku politik seseorang. Ada faktor-faktor situasional yang ikut berperan dalam mempengaruhi pilihan politik seseorang dalam pemilu. Dengan begitu, pemilih bukan hanya pasif melainkan juga individu yang aktif. Ia tidak terbelenggu oleh karakteristik sosiologis, melainkan bebas bertindak. Faktor-faktor situasional, bisa berupa isu-isu politik atau kandidat yang dicalonkan, seperti ketidakpercayaan dengan pemilihan yang bisa membawa perubahan yang lebih baik. Atau ketidakpercayaan masalah akan bisa diselesaikan jika pemimpin baru terpilih, dan sebagainya. Pemilih yang tidak percaya dengan pemilihan akan menciptakan keadaan lebih baik, cenderung untuk tidak ikut memilih.

Berdasarkan pendekatan ini Him Helwit mendefinisikan perilaku pemilih sebagai pengambilan keputusan yang bersifat instant, tergantung pada situasi sosial politik tertentu, tidak berbeda dengan pengambilan keputusan lain. Jadi tidak tertutup kemungkinan adanya pengaruh dari faktor tertentu dalam mempengaruhi keputusannya. Faktor pilihan rasional telah diungkapkan oleh Olson dan Down, “ tidak adanya kemauan mayoritas orang untuk berpartisipasi bukanlah tanda kebodohan melainkan rasionalitas mereka.

1. Golput ideologis

Indra J. Piliang menyatakan Dalam buku *Political Explore* bahwa golongan putih sebagai

bentuk perlawanan atas partai-partai politik dan calon presiden-wakil presiden yang tidak sesuai dengan aspirasi orang-orang yang kemudian golput. golput ideologis, yakni segala jenis penolakan atas apa pun produk sistem ketatanegaraan hari ini. Bagi golput jenis ini, produk UU sekarang, termasuk UU pemilu, hanyalah bagian dari rekayasa segolongan orang yang selama ini mendapatkan keistimewaan dan hak-hak khusus. Sistem Pemilu 1999, sebagaimana diketahui, hanyalah memilih tanda gambar sehingga rakyat tidak bisa memilih orang. Demokrasi berlangsung dalam wilayah abu-abu dan semu.

Demikian pula dalam kasus Kota Makassar terdapat masyarakat yang berada dalam jenis golput ideologis dimana mereka sudah tidak percaya dengan sistem demokrasi yang dianut oleh negara dan memilih untuk golput. Mereka juga cenderung melihat sisi negatif dari sistem pemerintahan serta para pemimpin yang menurut mereka tidak sesuai dalam menjalankan pemerintahan

2. Golput politis

Pada pemilihan walikota (pilwali) Makassar 2018 angka partisipasi pemilih menurun dibandingkan tahun 2013 yang lalu. Tingginya angka golput yang terjadi di Kota Makassar bukan lagi hal baru. Pada pemilihan walikota Makassar yang diikuti oleh 2 pasang kandidat dengan berbagai macam partai yang mengusung dan seorang oindependent yang pada akhirnya dianulirkepesertaannya pada pilwali oleh KPU yang pada akhirnya hanya melahirkan sepasan calon melawan sebuah kotak kosong. Terjadi kebingungan dalam masyarakat yang berdampak cukup negatif terhadap partisipasinya pada pemilihan walikota.

3. Golput pragmatis

Terdapat juga alasan pemilih yang enggan menggunakan hak pilihnya dengan alasan terlalu banyak pemilu yang diselenggarakan. Terjadi kejenuhan memilih di kalangan masyarakat yang merasa bahwa pemilu yang diadakan terlalu banyak dan beranggapan bahwa seharusnya pemilu dilaksanakan secara serentak. Masyarakat beranggapan bahwa suara mereka tidak terlalu penting dalam pemilihan, mereka merasa tidak akan mempengaruhi jalannya pemilihan umum apabila hanya satu suara yang tidak ikut dalam pemilihan hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Rosenberg sebagai salah satu alasan mengapa seseorang enggan untuk memilih yakni mereka beranggapan bahwa ikut berpartisipasi dalam kegiatan politik tidak akan mempengaruhi pribadi mereka.

Masyarakat dalam golongan ini pula yang di maksud oleh Indra J Piliang dalam *Politikal Xplore* sebagai golput pragmatis, yakni masyarakat yang mengkalkulasi untung dan rugi yang mereka peroleh bila mengikuti pemilu. Mereka cenderung memandang setengah-setengah dalam proses pemilu yang diselenggarakan.

Masyarakat juga cenderung tidak memilih dikarenakan kejenuhan yang terjadi. Banyaknya

pemilu yang diselenggarakan dalam kurun waktu yang berdekatan menjadi penyebab utama terjadinya kejenuhan. Tidak jarang pula masyarakat yang golput bingung dengan pemilu yang diadakan. Mereka sering beranggapan bahwa pemilu yang diadakan sebelumnya sama saja dengan pemilu yang sedang berlangsung. Pemilih yang awam akan politik tidak jarang golput karena beranggapan setelah memilih pada pemilihan sebelumnya mereka tidak perlu lagi datang memilih.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali,Novel. 1999. *Peradaban Komunikasi Politik*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Arsyad, Rahmad M, 2014, *Perang Kota Studi Politik Lokal Dan Kontestasi Elite Politik Boneka*, Jogjakarta :Resist Book
- Asfar, Muhammad. 2004. *Presiden Golput*. Jakarta: Jawa Pos Press.
- Basri, Seta. 2012. *Pengantar Ilmu Politik*. Jogjakarta: Indie Book Corner.
- Budiarjo, Miriam. 2009. *Dasar-dasar Ilmu politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Chaniago, Andrianof A. 2010. *Teori politik modern*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Efriza , 2012 , *Political Explore* , Bandung : Alfabeta
- Faisal. Sanapiah. 2005. *Format-Format Penelitian Sosial*. Jakarta: Rajawali Press.
- Hanurawan, Fattah. 2012. *Psikologi Sosial: Suatu Pengantar*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Huntington. Samuel P. dan Nelson. Joan M. 1997 *No easy choice : Political Participation In Developing Countries*. Cambridge, mass :harvarduniversiry press.
- Irawan. Prasetya. 2006. *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif untuk ilmu-ilmu sosial*. Depok: Departemen Ilmu Administrasi FISIP-UI.
- Kacung, Marijan.2006. *Demokratisasi di Daerah*. Surabaya: PustakaEureka.
- Kumorotomo, Wahyudi. 1999. *Etika Administrasi Negara*. Jakarta:Rajawali pers.
- Maran, Rafael Raga. 2007. *Pengantar sosiologi politik*. Jakarta: Rinka Cipta
- Mufti, Muslim. 2013. *Teori-Teori Politik*. Bandung: Pustaka Setia.
- Putra ,Fadillah , 2003 ,*Partai Politik Dan Kebijakan Publik*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Rahmat.Arifin. 1998.*Sistem Politik Indonesia*, Surabaya : Penerbit SIC.
- Rush, Michael. dan Phillip Althoff. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sanit. Arbi. 1992. *Aneka Pandangan Fenomena Politik: Golput*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Sastroadmojo.Sudijono. 1995.*Perilaku politik*, Semarang: IKIP Semarang Press.
- ShermanArnold K. dan KolkerAliza, 1987, *The Social Bases of Politics* , California : A Division of Wodsworth Inc.